

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terbatas terhadap Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kesatu Refika Aditama, Bandung, 2020.

_____, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Andasasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983.

Baharuddin & Ftimah Andi Rumpa, *Ncov Covid-19 Jangan Takut Virus Corona*, Andi, Jakarta, 2019.

Budiono, Herlien, *Demikian Akta Ini ; Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-I , Bandung, 2017.

Fadli, Zul, *Hukum Akta Notaris*, Cetakan I, Lingkar Kenotariatan, Jambi, 2020.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ke-2 , Erlangga, Jakarta, 1983.

G.J. Reiner, *Metode Dan Manfaat Ilmu Sejarah*, (Terjemahan Umar, Muin), Pustaka Pelajar , Jakarta, 1997.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Hukum Umum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik*, terjemahan Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

H.A.W. Widjaja, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta.

Mansur, Didik M. Arif, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

_____, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Cetakan ke-1,

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019.

_____, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Mahfud MD, *Politik Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Cetakan Ke5, Rafagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Moh Kusnardi, Harmally Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke- 7, Budi Chaniago, Jakarta, 1988.

Nurita, Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal Akta dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Peter M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2020.

Romli, Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sudarta Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1978.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan kedua, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetrid Sadino, Cetakan Ke-29, Pradnya Paramita, 2001.

Zulfa Djoko Basuki, *Kemungkinan Indonesia Mengakses The Hague Convention Abolishing the Requirment of Legalization for Foreign Public Document*, BPHN, Jakarta, 2013.

2. Peraturan Perundang Undangan

Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Kitab Hukum Acara Perdata Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document* / Konvensi Apostille

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK15/2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK16/2020).

Belanda

The Temporary Emergency Act 2020

3. Jurnal

Ahmad Haris Junaidi, *Urgensi dan Tantangan Indonesia dalam Akses Konensi Apostille*, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7 Nomor. 2, Jakarta, 2 Agustus 2018.

Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary; Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, Viva Justicia law, Jakarta, November 2018.

Carisma Gagah Arisatya, Sihabudin, Rahmat Safa'at, *Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik*, Program Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Cyndiarnis Cahyaning Putri, dkk, *Konseptualisme dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum*, Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 4 No. 1, Malang, 2018

Dewa Ayu Widya Sari, dkk, *Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Psal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017-2018.

Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3, Jakarta, Juli- September 2011.

Herlien Budiono, *Notaris Menurut Common Law Dan Civil Law serta Peraturan Terkait Dalam Rangka Pemenuhan Kemudahan Berusaha Di Indonesia*, Makalah pada seminar International Tentang "Pemenuhan Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*) : Peluang Dan Tantangan Dan Peran Notaris Serta Profesi Hukum Lainnya Dalam Pelaksanaannya (*Opportunity, Challenge And Role Of Notary And Orther Legal Professions In The Implementation*)", Bali Nusa Bua Convention Centre, Bali, Indonesia, 7-9 September 2017.

Indra Pranajaya, *Studi Komparatif Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia dan Jepang*, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012

Luthvi Febryka Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum Vol 2, 1 juni 2011.

Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3, Jakarta, Juli- September 2011.

Kadek setiadewi, dkk, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta*

Otentik, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Mahasarakswati Denpasar, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, 2020.

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof.,Dr.,Mochtar Kusumaatmadja, SH,LLM*, Badilum, Malang, 2015.

Muhammad Reza Hastomo Aji, Studi Komparatif Penyediaan Penerjemah Terhadap Penghadap Notaris Tuli Di Indonesia Dan Jepang, Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 5 No.1, 2020.

Priskila Pratita Penasthika, Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara Anggota ASEAN Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2018, Perspektif Hukum Perdata Internasional, Jurnal Penelitian Hukum Sipremasi Hukum, Jakarta, Volume 24 Nomor 2, Agustus 2015.

Rieke Fajri Maulidiyah, Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia, Jurnal Hukum Program Magister Kenotariatan PPS Unisma, Vol. 4 No. 2, Malang, 2020.

Syamsul Bahri,dkk, Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary, Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 8 N.2. November 2019.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan, Kepailitan dengan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum UGM, Volume 14 No.02, Mei 2014, Yogyakarta.

Zainatun Rossalina, dkk, Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik, Jurnal Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya.2016.

Sumber Lain

Internet

Unpas;<https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-disaatpandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-terakhir> dilihat 20 Febuari 2021 jam 18.00.

UNCITRAL, official Records of the General Assembly, Foreith Session, Supplement No.17 (A/40/17), CHAP, vi, SECT,B, 11 Dec 1985. [the recommendation on the legal value of computerrecords].<https://digitallibrary.un.org/record/90550/files/a-40-17-e.pdf>, terakhir dilihat 6 Maret 2021,Jam 10.00.

Ojk.go.id, Implementasi Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) pada Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (Sprint) untuk Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) terakhir dilihat pada 3 Maret 2021 Jam 21.30.

<https://kliklegal.com>, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 dan 16/2020, Jakarta, terakhir kali dilihat pada 6 Juni 2021 Jam 21.00

www.pkioverheidcertificaat, E-Boukeden, Wat is En Pkioverheid Certificate, Amsterdam, 2019, terakhir kali dikunjungi pada 10 Juni 2021 Jam 22.00.

<http://portal.ahu.go.id>, Meningkatkan Rangkings EODB Melalui Akses Konvensi Apostille dan Keanggotaan Indonesia Dalam HCCG, Jakarta, 2020, terakhir kali dikunjungi 13 Juni 2021 Jam 22.00.

Suara.com Pidato Jokowi di KTT P4G, Kita harus Lakukan Cara-Cara Yang Luar Biasa, Jakarta, 31 Mei 2021.

Webinar

Notaire, RUPS teleconference, tanggal 31 Januari 2021 Jam 19.30.

Notarindo, Inovasi BAR RUPS Pt Non Tbk melalui Vicon, Sertifikat Elektronik Suatu Keniscayaan, tanggal 17 Februari 2021 Jam 13.30.

Indonesia Notarity Community, Pembuatan akta Pada Masa Pandemi, tanggal 31 Desember 2020 jam 14.00

IMMK UI, Implementasi e-RUPS Sebagai Sebuah Tantangan Dan Peluang Pada Era Disrupsi, Jakarta, 8 Mei 2021.

